



# **BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Indikator Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
19. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016-2021.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
- d. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat;
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Pesisir Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- g. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk periode 5 (lima) tahun;
- i. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan dari Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan; dan
- j. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

### **BAB II**

#### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 2**

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah;
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

### **BAB III**

#### **DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**BAB IV**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021;
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan indikator pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- (3) IKU pada setiap tingkatan Perangkat Daerah meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan pemerintahan, tugas dan fungsi.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal *14 Desember* 2016  
~~BUPATI PESISIR BARAT,~~

~~AGUS ISTIQLAL~~

Diundangkan di Krui  
pada tanggal *14 Desember* 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**AZHARI**

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
 NOMOR 49 TAHUN 2016  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR BARAT  
 TAHUN 2016-2021**

<b>MISI 1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT PESISIR BARAT YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT, DAN BERAHLAK MULYA</b>					
<b>SASARAN</b>		<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama pada Semua Lapisan Masyarakat	1	Persentase Realisasi Fasilitas dan Pembinaan Keagamaan oleh Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
2	Terwujudnya Budaya Tertib Hukum	1	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
3	Peningkatan Derajat Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
4	Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Buku Profil Pendidikan
		2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Buku Profil Pendidikan
		3	Angka Buta Huruf	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Buku Profil Pendidikan
5	Peningkatan Derajat Kesehatan Dan Status Gizi Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Dinas Kesehatan	Buku Profil Kesehatan
		2	Jumlah Kematian Bayi (Kasus)	Dinas Kesehatan	Buku Profil Kesehatan
		3	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Kasus)	Dinas Kesehatan	Buku Profil Kesehatan

6	Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Profil Kependudukan
		2	Angka Kelahiran Total (TFR)	Dinas Kesehatan	Buku Profil Kesehatan
		3	Peserta Keluarga Berencana Aktif	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
7	Penurunan Tingkat Pengangguran Dan Perluasan Kesempatan Kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
8	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Budaya	1	Indeks Pembangunan Gender	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Persentase Penduduk Miskin Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Disabilitas, Anak Korban Bencana, Yang Memperoleh Perlindungan Sosial Yang Komprehensif	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		3	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Memenuhi Kualifikasi Berdasarkan Standar Organisasi Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		4	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan/Perlombaan Olahraga Skala Kabupaten Yang Difasilitasi Pemda	Dinas Pemuda dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		5	Indeks Desa Membangun	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

<b>MISI 2 MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT PEKON DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN KEKAYAAN LAUT, PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SEBAGAI BASIS EKONOMI KERAKYATAN</b>					
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Berdasarkan Pada Struktur Perekonomian Daerah Yang Kokoh	1	Pendapatan Perkapita	Seluruh Perangkat Daerah	Buku Indikator Ekonomi Daerah/Buku PDRB Kabupaten
		2	Pertumbuhan Ekonomi	Seluruh Perangkat Daerah	Buku Indikator Ekonomi Daerah/Buku PDRB Kabupaten
2	Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Daerah berbasis Pengembangan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1	Nilai Tukar Nelayan	Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan	Buku Profil Perikanan
		2	Nilai Tukar Petani	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Buku Profil Pertanian
3	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sebagai Penopang Perekonomian Daerah	1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Buku Indikator Ekonomi Daerah/ Buku PDRB Kabupaten
		2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Buku Indikator Ekonomi Daerah/ Buku PDRB Kabupaten
		3	Kontribusi Sektor Jasa Lainnya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Buku Indikator Ekonomi Daerah/ Buku PDRB Kabupaten
		4	Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Buku Indikator Ekonomi Daerah/ Buku PDRB Kabupaten
		5	Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Per Tahun	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Buku Profil Koperasi, UMKM
		6	Persentase Koperasi Aktif	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Buku Profil Koperasi, UMKM

<b>MISI 3 MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR, SUMBER DAYA ENERGI DAN MITIGASI BENCANA SERTA PENGUATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN</b>					
1	Tersedianya Prasarana dan Sarana Transportasi Yang Handal, Mengkoneksikan Seluruh Pelosok Daerah, Terintegrasi Dengan Upaya Pembangunan Bidang Lainnya, Serta Sesuai Dengan RTRW	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Persentase Pusat-Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi Di Wilayah Kabupaten yang dijangkau (dilalui) oleh Angkutan Umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		3	Terminal Angkutan sebagai Simpul Penghubung Jaringan Transportasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		4	Prasarana dan Sarana Perhubungan Laut Sesuai Kebutuhan dan Standar Kualitas	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		5	Prasarana dan Sarana Perhubungan Udara Sesuai Kebutuhan dan Standar Kualitas	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		6	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi (Persen/Tahun)	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
2	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Energi (Khususnya Listrik) Secara Merata, Berkelanjutan, dan Ramah Lingkungan	1	Rasio Elektrifikasi	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Penerangan Yang Bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan (Bioenergi/ Geothermal/Tenaga Air/Tenaga Angin/Tenaga Surya)	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
3	Terwujudnya Infrastruktur untuk Mendukung Penanggulangan Bencana (Tsunami, Gempa, Serta Bencana Alam Lainnya)	1	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penyelamatan dini Bencana pada Kawasan-kawasan Resiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Buku Profil Mitigasi Bencana

		2	Tersedianya Alat dan Instrumen Teknologi Informasi dan Komunikasi Peringatan Dini Bencana pada Kawasan-kawasan Resiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Buku Profil Mitigasi Bencana
		3	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Buku Profil Mitigasi Bencana
		4	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penanggulangan Bencana Untuk Tim <i>Search and Rescue</i> (SAR) dan Tim Reaksi Cepat (TRC), serta Relawan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Buku Profil Mitigasi Bencana
4	Tersedianya Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Mhluk Hidup (Manusia, Tumbuhan, dan Hewan), Baik pada Waktu Sekarang maupun yang akan Datang	1	Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang sudah Ada Sesuai dengan Kewenangannya	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
5	Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi yang Berkualitas, Layak, Sehat, Aman, Mencukupi Kebutuhan, Serta Berkelanjutan	1	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Cakupan Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Air Limbah Domestik	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		3	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Jamban Sanitasi Layak	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		4	Cakupan Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
6	Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten	1	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Skala Mantap	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran DPRD Kabupaten Dalam Skala Mantap	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

7	Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Sesuai Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah	1	Tersedianya Informasi Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah Penataan Ruang yang ditangani/ditidaklanjuti	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
8	Terwujudnya Lingkungan Yang Indah Berseri	1	Rasio Luas Taman dan Ruang Publik Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Luas Wilayah	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
9	Terwujudnya Daya Dukung Infrastruktur Komunikasi Dan Informasi Yang Handal Dan Merata	1	Cakupan/Jangkauan Pelayanan Telekomunikasi dan Internet pada Pusat-Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kabupaten	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
10	Menurunnya Beban Pencemaran Dan Tingkat Kerusakan Lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Cakupan Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Persampahan	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		3	Persentase Masalah Hukum Lingkungan Hidup Yang Ditindak Lanjuti	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
<b>MISI 4 MEWUJUDKAN KABUPATEN PESIRIR BARAT SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA YANG BERPIJAK PADA KEARIFAN LOKAL</b>					
1	Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perkonomian Daerah	1	Jumlah Destinasi dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Buku Profil Pariwisata
		2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Buku Profil Pariwisata
		3	Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Buku Profil Pariwisata
		4	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Buku Profil Pariwisata

<b>MISI 5 MENINGKATKAN PELAYANAN UMUM KEPADA MASYARAKAT GUNA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BAIK (GOOD GOVERNANCE)</b>					
1	Peningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Pembangunan Daerah	1	Persentase Perangkat Daerah yang Muatan Rencana Strategis (Renstra)-nya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
		2	Persentase Perangkat Daerah yang Muatan Rencana Strategis (Renstra)-nya Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten	Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
		3	Tingkat Kesesuaian antara Muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
		4	Persentase Muatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
		5	Persentase Desa/Pekon yang Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes)-nya Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Pekon
		6	Skor Capaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		7	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin PNS	Inspektorat	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		8	Persentase Instansi Yang Menerapkan Kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Badan Kepegawaian Daerah	Dokumen SKP Pegawai Kabupaten

		9	Terpenuhinya Kebutuhan Data Statistik Dan Informasi Pembangunan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen/Data/Informasi/Database
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dan Kapasitas Keuangan Daerah	1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	LHP BPK Atas LKPD
		2	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		3	Rasio Penerimaan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Penerimaan Daerah	Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3	Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Dan Perangkat Daerah Semakin Kuat	1	Persentase Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Standar Kualitas Yang Baik (Persen/Tahun)	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		3	Persentase Dokumen Administrasi Perkantoran yang Diselesaikan Tepat Waktu (Persen/Tahun)	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		4	Persentase Dokumen/Arsip Daerah yang dipelihara	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		5	Persentase Rumusan Kebijakan dan Produk Hukum Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Toponimi, dan Pertanahan yang diselesaikan Secara Tepat Waktu dan Taat Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		6	Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuankan Kepada Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

	7	Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Yang diselesaikan Tepat Waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan DAK TP
	8	Tingkat Kemantapan Kerjasama Pembangunan dengan Domain Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat	Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Buku Profil Investasi
	9	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Kerjasama Antar Kabupaten Kepada Provinsi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	11	Persentase Desa dan Kelurahan yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	12	Meningkatnya Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	13	Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	14	Persentase Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kelompok Pemuda (OKP) yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Organisasi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	15	Persentase Perangkat Daerah Bermasalah yang dibatalkan	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	16	Persentase Program Legislasi Daerah yang Terealisasi	Sekretariat DPRD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

		17	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Dibahas	Sekretariat DPRD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
--	--	----	---	------------------	------------------------------------

**BUPATI ~~RESISIR~~ BARAT,**

**~~AUS-ISTIQLAL~~**

LAMPIRAN II :  
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016-2021

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT

(KOP SURAT SESUAI NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH)

**KEPUTUSAN KEPALA (...nama Perangkat Daerah...)  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR .../2016  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama Perangkat Daerah...)  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPALA (...nama Perangkat Daerah...)  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor ... Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama Perangkat Daerah...); dan
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (...nama Perangkat Daerah...).

- Mengingat** : 1. ... ;  
2. ... ;  
3. dst ...

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA (...nama Perangkat Daerah...) KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama Perangkat Daerah...) KABUPATEN PESISIR BARAT

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (...nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Pesisir Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...*nama Perangkat Daerah...*) Kabupaten Pesisir Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (... *nama Perangkat Daerah ...*) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (... *nama Perangkat Daerah...*) Kabupaten Pesisir Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 2016

**KEPALA (...*nama Perangkat Daerah...*)  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**(Nama Lengkap dan Titel)  
(Pangkat)  
(NIP. ...)**

---

**BUPATI/PESISIR BARAT,**

**AQUS ISTIQLAL**



2	...	1	...		
		2	...		
		3	... dst		
3	... dst	1	...		
		2	...		
		3	... dst		

**KEPALA (...nama Perangkat Daerah...)  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**(Nama Lengkap dan Titel)  
(Pangkat)  
(NIP. ...)**

---

**~~BURATI~~/PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
 NOMOR 4 TAHUN 2016  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR BARAT  
 TAHUN 2016-2021**

<b>MISI 1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT PESISIR BARAT YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT, DAN BERAHLAK MULYA</b>					
<b>SASARAN</b>		<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama pada Semua Lapisan Masyarakat	1	Persentase Realisasi Fasilitas dan Pembinaan Keagamaan oleh Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
2	Terwujudnya Budaya Tertib Hukum	1	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		2	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
3	Peningkatan Derajat Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
4	Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Buku Profil Pendidikan
		2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Buku Profil Pendidikan
		3	Angka Buta Huruf	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Buku Profil Pendidikan
5	Peningkatan Derajat Kesehatan Dan Status Gizi Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Dinas Kesehatan	Buku Profil Kesehatan
		2	Jumlah Kematian Bayi (Kasus)	Dinas Kesehatan	Buku Profil Kesehatan
		3	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Kasus)	Dinas Kesehatan	Buku Profil Kesehatan

2	...	1	...		
		2	...		
		3	... dst		
3	... dst	1	...		
		2	...		
		3	... dst		

**KEPALA (...nama Perangkat Daerah...)  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**(Nama Lengkap dan Titel)  
(Pangkat)  
(NIP. ...)**

---

**~~BUPATI PESISIR BARAT,~~**

**AGUS ISTIQLAL**